

ABSTRAK

Pekerja migran Indonesia dilanda sejumlah tantangan dalam memperoleh perlindungan hukum yang layak, terutama akibat dari perubahan pengaturan perpanjangan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Kajian ini bertujuan menganalisis perubahan pengaturan dalam perpanjangan SIP3MI yang dirumuskan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Fokus utama dalam kajian ini menganalisis alasan yang melatarbelakangi perubahan pengaturan perpanjangan SIP3MI dan menganalisis implikasi perubahan pengaturan perpanjangan SIP3MI pada UU Cipta Kerja terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Yuridis empiris sebagai pendekatan pada kajian ini, dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Kementerian Ketenagakerjaan dan Migrant Care, menjadi narasumber dalam wawancara kajian ini yang digunakan sebagai jenis data. Teknik pengumpulan pada penelitian, yakni wawancara dan *studi literatur*. Informasi yang telah diperoleh akan dijabarkan secara teknik analisis data *kualitatif*.

Hasil dari kajian ini adalah efisiensi dari mekanisme perpanjangan administratif yang sulit. Akan tetapi perubahan ini pula melemahkan perlindungan pekerja migran diantaranya, lemahnya pengawasan pemerintah dalam menjamin hak pekerja migran Indonesia dan ketidakpatuhan P3MI dalam memenuhi tanggung jawab hak pekerja migran. Ketiadaan pengawasan yang layak berpotensi dalam melanggar hak pekerja migran, salah satunya praktek pengelabuan yang dilakukan oleh P3MI. Reformulasi peraturan yang solutif juga diperlukan, seperti mengadopsi kembali Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 untuk memperkuat perlindungan pekerja migran. Dibutuhkannya pengaturan perpanjangan kembali dan penambahan persyaratan perpanjangan SIP3MI setiap lima tahun sekali. Skema pelaporan yang efektif guna pekerja migran memperoleh perlindungan yang maksimal.

Kata Kunci: SIP3MI, Pekerja Migran Indonesia, P3MI, Perlindungan Pekerja Migran

ABSTRACT

Indonesian Migrant Workers confront various challenges in getting satisfactory lawful assurance, especially due to changes within the directions overseeing the expansion of the Commerce Permit for the Situation of Indonesian Migrant Workers (SIP3MI). This consider points to analyze the reasons behind the changes within the SIP3MI expansion directions and look at the suggestions of these changes beneath the Work Creation Law on the assurance of Indonesian Migrant Workers.

Experimental juridical as an approach to this consider, with expository expressive investigate determinations. The Service of Labor and Migrant Care was the asset individual within the interviews for this ponder which were utilized as a sort of information. Collection procedures in inquire about, specifically interviews and writing ponder. The data that has been gotten will be depicted utilizing subjective information investigation methods.

The discoveries of this study reveal an increment within the effectiveness of the already awkward authoritative expansion component. In any case, these changes have too debilitated the security of transient laborers, counting deficiently government oversight to ensure the rights of Indonesian Migrant Workers and non-compliance by P3MI in satisfying their duties toward transient laborer rights. The lack of adequate supervision creates the potential to violate migrant workers' rights, one of which is the deceptive practices carried out by P3MI. A reformulation of regulations that offer solutions is also needed, such as re-adopting Law Number 18 of 2017 to strengthen the protection of migrant workers. Renewal arrangements and Extra SIP3MI expansion necessities every five years. An viable announcing conspire are required to maximize the security of transient specialists.

Keywords: *SIP3MI, Indonesian Migrant Workers, P3MI, Migrant Worker protection*